



BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam rangka itu Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura melalui tim penyusun LAKIP berusaha menyusun Laporan akuntabilitas tersebut sebagai wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi RI No.53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja dan tata cara reuiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada presiden selaku kepala pemerintahan .

LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura ini memuat informasi Kinerja (*performance information*), yakni hasil pengolahan data capaian kinerja yang membandingkan antara realisasi capaian kinerja dengan rencana kinerja yang ada sehingga diperoleh pengetahuan mengenai keberhasilan/kegagalan pencapaian visi misi organisasi dan dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja organisasi.



Pembangunan kesehatan pada dasa warsa ini diselenggarakan untuk dapat mewujudkan visi “MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN” dimana masyarakat diharapkan dapat secara mandiri memenuhi kebutuhan dasarnya untuk hidup sehat sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang tersebar hampir di seluruh Distrik di wilayah Kabupaten Jayapura dan adanya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan baik secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta pelayanan kesehatan dasar ke daerah terpencil/terisolir secara berkala merupakan gambaran / bukti nyata adanya upaya Dinas Kesehatan dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan guna mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera dan mandiri. Namun upaya-upaya yang dilakukan tidak selamanya dapat menunjukkan hasil yang langsung dirasakan/dimanfaatkan oleh masyarakat luas, oleh karena itu diperlukan suatu alat ukur yang dapat melihat berhasil tidaknya suatu program / kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan jaringannya. Kesemuanya itu dapat dituangkan dalam laporan hasil kinerja instansi dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura yang merupakan Laporan Evaluasi Kinerja Dinas dalam upaya peningkatan Pembangunan dibidang kesehatan secara komprehensif baik yang bersifat Promotif, Preventif, kuratif dan Rehabilitatif.

1.2 Landasah Hukum

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Tahun 2016 disusun dengan berpedoman pada :

- 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan derivatnya khususnya Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,



Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang memberi ruang bagi partisipasi para pemangku kepentingan;

- 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 5 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
- 6 Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan daerah;
- 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
- 11 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
- 12 Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP;
- 13 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 14 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



15 Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2013-2017

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan didalam mengemban visi, misi pembangunan kesehatan tentunya tidak terlepas dari tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok dan fungsi merumuskan sasaran dan kebijakan teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas mengarahkan, membina dan menandatangani naskah dinas, mengikuti rapat, seminar, dengar pendapat, sidang DPRD, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan mengajukan saran serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan data, pedoman dan ketentuan yang berlaku.

Di dalam melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura dibantu oleh:

2. **Sekretaris** membawahi ; Sub Bagian Umum dan Program, Sub Bagian Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan.

Sekretaris mempunyai tugas pokok merumuskan rencana dan program kerja Sekretariat Dinas Kesehatan, mengkoordinasikan kegiatan, mendistribusikan tugas, mengarahkan, memberikan petunjuk dan melakukan pembinaan dibidang umum dan program, administrasi kepegawaian, keuangan, program dan pelaporan, memberikan layanan konsultasi dibidang umum, keuangan, program dan pelaporan, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan data, pedoman dan ketentuan yang berlaku.

3. **Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan**, membawahi ; Seksi Kesehatan Dasar dan Seksi Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok menyusun sasaran, kebijakan dan rencana kerja Bidang Pelayanan Kesehatan, Mengkoordinasikan kegiatan , mendistribusikan tugas,



mengarahkan dan memberi petunjuk, memeriksa, memantau dan mengendalikan kegiatan pada Bidang Pelayanan Kesehatan, mengikuti rapat, seminar, dengar pendapat sidang DPRD, memberikan layanan konsultasi, memantau serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan data, pedoman dan ketentuan yang berlaku.

4. **Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan**, membawahi ; Seksi Pengendalian dan pemberantasan Penyakit dan Seksi Wabah, Bencana dan Kesehatan Lingkungan.

Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan mempunyai tugas pokok Menyusun sasaran dan rencana kerja Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, mengkoordinasikan kegiatan, mendistribusikan tugas, mengarahkan dan memberipetunjuk, memeriksa, memantau dan mengendalikan masalah kesehatan dibidang pencegahan/pemberantasan penyakit dan kesehatan lingkungan, mengikuti rapat, seminar, dengar pendapat sidang DPRD, memberikan layanan konsultasi, memantau serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan data, pedoman dan ketentuan yang berlaku.

5. **Kepala Bidang Pengembangan SDM Kesehatan**, membawahi ; Seksi Perencanaan dan pendayagunaan dan Seksi Pendidikan, Pelatihan, Registrasi dan Akreditasi.

Kepala Bidang SDM Kesehatan mempunyai tugas pokok menyusun rencana kerja Bidang Pengembangan SDM Kesehatan, Mengkoordinasikan kegiatan, mendistribusikan tugas, mengarahkan dan memberi petunjuk, memeriksa, memantau dan mengendalikan kegiatan perencanaan, pendayagunaan, pendidikan, pendidikan dan registrasi serta akreditasi, menyelenggarakan bimbingan dan pelatihan pengembangan SDM dibidang kesehatan, mengikuti rapat, seminar, dengar pendapat sidang DPRD, memberikan layanan konsultasi, memantau serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan data, pedoman dan ketentuan yang berlaku.

6. **Kepala Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan**, membawahi ; Seksi Jaminan Kesehatan dan Seksi Sarana, Peralatan Kesehatan dan Kefarmasian.



Kepala Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan mempunyai tugas pokok menyusun rencana kerja Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, mengkoordinasikan kegiatan, mendistribusikan tugas, mengarahkan dan memberi petunjuk, memeriksa, memantau dan mengendalikan kegiatan di bidang jaminan dan Sarana Kesehatan, mengikuti rapat, seminar, dengar pendapat sidang DPRD, memberikan layanan konsultasi, memantau serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan data, pedoman dan ketentuan yang berlaku.

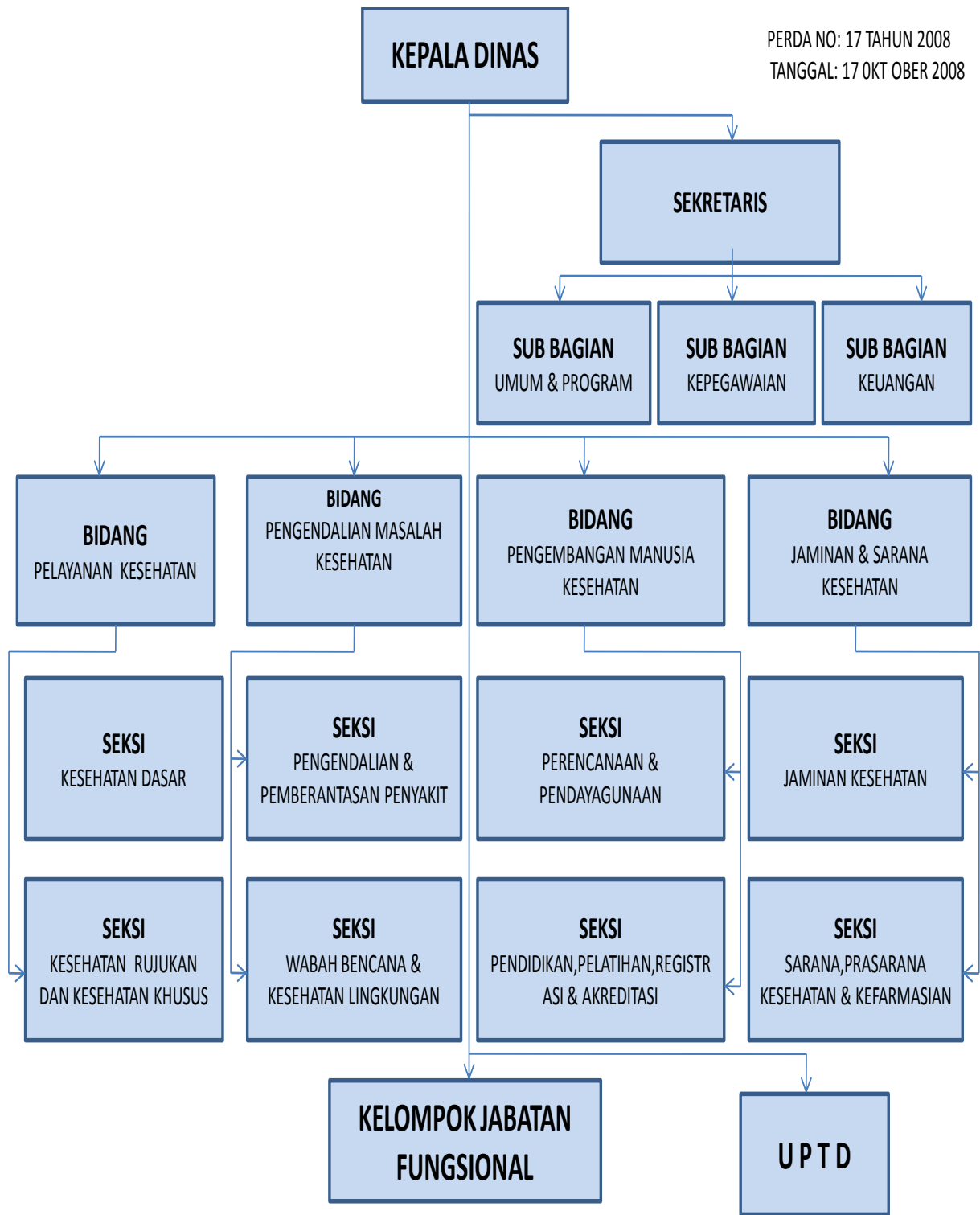
7. Kepala Puskesmas

Melaksanakan tugas teknis pelayanan kesehatan di Distrik sesuai petunjuk/pedoman/data informasi/Peraturan perundang-undangan antara lain :

- Melaksanakan kebijakan teknis bidang kesehatan
- Mengatur dan memberi petunjuk teknis penyelenggaraan program dan kegiatan pelayanan kesehatan
- Membina penyelenggaraan ketatausahaan pada Puskesmas
- Merencanakan pengembangan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
- Mengkoordinasikan tenaga teknis dan fungsional UPTD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
- Membina kerja sama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan
- Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada UPTD
- Membagi tugas dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
- Melaporkan pelaksanaan tugas secara periodik kepada atasan



Struktur Organisasi SKPD





1.4 Analisis Aspek Strategis

Aspek strategis adalah aspek yang mendukung dan merupakan sumber daya dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan menuju perwujudan visi dan misi Dinas kesehatan Kab. Jayapura, aspek-aspek tersebut antara lain:

1.4.1 Aspek Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Kesehatan Tahun 2016 termasuk Puskesmas selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	TENAGA	STATUS	RASIO (Standard Nasional)	JUMLAH THN 2016
1	DR. SPESIALIS		7	10
2	DOKTER	PNS	47	22
		PTT		10
		Kontrak		5
3	DOKTER GIGI	PNS	13	5
		PTT		1
4	SKM	PNS	47	75
5	FARMASI	APT	12	7
		ASS.APT	35	20
6	SANITARIAN	D3 KESLING	47	26
		SANITARIAN		4
7	GIZI	D3 GIZI	26	38
		PEL.GIZI		2
8	PERAWAT	UMUM	157	81
		SPRG		3
		D3 GIGI		3
		D3 PERAWAT		260
		S1 Keperawatan		2
		NERS		12
9	BIDAN	D3 BIDAN	118	116
		D4 Bidan		6
		BIDAN		36
10	KETEKNISAN MEDIS	D3 ANALIS	17	17
		SMAK		29
		NON-ANALIS		0

1.4.2 Aspek Sarana Pelayanan Kesehatan

Dinas Kesehatan kabupaten jayapura memiliki sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Sarana fasilitas layanan kesehatan antara lain 1 RSUD, 19 Puskesmas, 58 Puskesmas Pembantu dan 19 Polindes. Disamping itu terdapat sarana kesehatan swasta yang turut membantu layanan kesehatan di Kabupaten Jayapura. Hal tersebut dapat terlihat dalam tabel dibawah ini :



NO	FASILITAS KESEHATAN	PEMILIKAN/PENGELOLA						
		KEMENKES	PEM.PROV	PEM.KAB/KOTA	TNI/POLRI	BUMN	SWASTA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	RUMAH SAKIT UMUM			1				1
2	RUMAH SAKIT JIWA							-
3	RUMAH SAKIT BERSALIN							-
4	RUMAH SAKIT KHUSUS LAINNYA							-
5	PUSKESMAS PERAWATAN			6				6
6	PUSKESMAS NON PERAWATAN			13				13
7	PUSKESMAS KELILING							-
8	PUSKESMAS PEMBANTU			58				58
9	RUMAH BERSALIN							-
10	BALAI PENGobatan/KLINIK						1	1
11	PRAKTIK DOKTER BERSAMA							-
12	PRAKTIK DOKTER PERORANGAN							-
13	PRAKTIK PENGobatan TRADISIONAL						1	1
14	POSKEDES			7				7
15	POSYANDU			202				202
16	APOTEK						11	11
17	TOKO OBAT						2	2
18	GFK			1				1
19	INDUSTRI OBAT TRADISIONAL							-
20	INDUSTRI KECIL OBAT TRADISIONAL							-

Disisi lain pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan tetap terus dilakukan guna meningkatkan akses pelayanan. Dari 19 Distrik semua sudah tersedia sarana Puskesmas, 6 diantaranya adalah puskesmas dengan fasilitas perawatan, 58 Puskesmas Pembantu (Pustu), 19 Polindes (Pondok bersalin desa) 24 unit puskesmas keliling (pusling)/Ambulans roda 4, 3 unit pusling air serta di setiap puskesmas di sediakan juga pusling roda 2



1.4.3 Aspek Pembiayaan Kesehatan

NO	SUMBER BIAYA	ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN		
		2014	2015	2016
1	2	3	4	5
	ANGGARAN KESEHATAN BERSUMBER:			
1	APBD KAB/KOTA	61,056,656,450	76,477,617,401	83,557,737,392
	a. Belanja Langsung	31,493,502,250	38,659,423,193	50,853,770,610
	b. Belanja Tidak Langsung	29,563,154,200	37,818,194,208	32,703,966,782
2	APBD PROVINSI			
	- Dana Tugas Pembantuan (TP) Provinsi			
	- OTSUS	15,537,595,000	15,500,000,000	15,885,000,000
3	APBN :			
	- Dana Alokasi Umum (DAU)	7,154,924,228	8,585,885,221	8,634,694,500
	- Dana Alokasi Khusus (DAK)	4,620,450,000	6,740,946,072	18,501,484,210
	- Dana Dekonsentrasi			
	- Dana Tugas Pembantuan :			
	a. BOK/ KIA DAN GIZI	5,182,700,000	3,615,258,000	
	b. TP BUK APBN		4,779,500,000	
	- KAPITASI JKN	5,110,832,000	7,832,591,900	7,832,591,900
4	PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN)			
	UNICEF	311,692,000	dikelola pihak ke-3	dikelola pihak ke-3
	GLOBALFUND	622,773,327	dikelola pihak ke-3	dikelola pihak ke-3
	NLL	28,725,000		
5	SUMBER PEMERINTAH LAIN			
TOTAL ANGGARAN KESEHATAN		61,056,656,450	76,477,617,401	83,557,737,392

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan anggaran dari tahun 2014-2016 yang dalam analisisnya terjadi peningkatan anggaran dari penyediaan kapitasi JKN kepada puskesmas melalui BPJS, peningkatan belanja tidak langsung dan khusus untuk 2016 terjadi perubahan sistem keuangan dengan berpindahnya dana BOK melalui TP APBN kepada DAK Non fisik. Secara umum peningkatan anggaran melalui DAU dan OSUS tidak mengalami perubahan berarti.



Sarana komunikasi, transportasi, penerangan.

Sarana Komunikasi antara Dinas Kesehatan dengan Puskesmas pada umumnya sudah menggunakan telepon Celluler, tetapi dari 19 Puskesmas 2 diantaranya masih menggunakan radio SSB.

Alat transportasi dari Kabupaten ke Distrik sebagian besar lewat darat, 1 Distrik dijangkau lewat udara atau sungai yakni Distrik Airu, 2 Distrik dijangkau lewat laut yakni Distrik Yokari dan Revenirara dan 1 Distrik dijangkau lewat danau yakni Distrik Ebungfauw.

Sarana Penerangan untuk Puskesmas dari 19 Puskesmas yang ada 16 Puskesmas sudah menggunakan listrik dari PLN, namun belum seluruhnya bisa berfungsi 24 jam (Demta,Unurum Guay,Yapsi dan Lereh), dan 3 diantaranya menggunakan solar sel yakni; Puskesmas Yokari, Airu dan Saduyap.

Keadaan Lingkungan

Hasil pengawasan kesehatan lingkungan yang mencakup lingkungan pemukiman, tempat-tempat umum (TTU) dan sarana air bersih yang tersedia menunjukkan bahwa kondisi kesehatan lingkungan di wilayah Kabupaten Jayapura masih jauh dari yang diharapkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan tahun 2015 menunjukkan bahwa keluarga yang memiliki akses air minum yang layak hanya 31,14 %, jumlah penduduk yang memiliki akses jamban sehat keluarga tahun 2015 hanya 30.114 (24,8%) dari 121.436 penduduk kab Jayapura. Namun Kab Jayapura perlu berbangga karena 14 kampung telah Stop BABS (ODF). Dari pendataan TTU (Tempat – Tempat Umum) untuk tahun 2015 yang diperiksa adalah sarana pendidikan, sarana yankes, Hotel dan Tempat pengolahan makanan. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut : sarana yankes yang diperiksa sebanyak 20 sarana dan sarana pendidikan sebanyak 189 sarana sedangkan TUPM (Hotel,Tempat Pengolahan Makanan termasuk Restoran dan Rumah Makan) yang diperiksa sebanyak 5 dan yang sehat hanya 1 sarana.

Persebaran Penduduk

Jumlah Penduduk Kabupaten Jayapura Tahun 2016 sebesar 123.780 jiwa (Proyeksi Pusdatin 2016), yang terdiri dari laki-laki sebesar 65.753 jiwa dan perempuan sebesar 58.027 jiwa, data penduduk tersebut diperoleh dari hasil Proyeksi Penduduk tahun 2016. Distribusi penduduk



terbanyak di Distrik Sentani (47.952 jiwa) yang merupakan daerah perkotaan/Ibu kota Kabupaten. Untuk 18 Distrik lainnya jumlah penduduknya berkisar antara 1000 – 8000an dengan penduduk paling sedikit di Distrik Airu (1.000 jiwa).

Kabupaten Jayapura dengan luas wilayah sebesar 17,516 km² dihuni oleh 123.780 jiwa/penduduk (Data Pusdatin 2016), dengan demikian angka kepadatan penduduk Kabupaten Jayapura tahun 2016 berkisar 7,06 jiwa per km² atau 70 orang per 10 km², dengan penduduk terpadat di Distrik Sentani dan terjarang penduduknya di Distrik Airu

Jumlah Penduduk Kabupaten Jayapura Tahun 2016 sebesar 123.780 jiwa terdiri dari laki-laki 65.753 (53,1%) jiwa dan perempuan 58.027 (46,9%) jiwa dengan sex Ratio laki-laki dibanding perempuan 1,13 : 1 atau setiap 113 laki-laki terdapat 100 Perempuan . Dependensi Ratio 1,3 artinya setiap 100 orang produktif menanggung 113 orang

Perekonomian

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jayapura Tahun 2013 sebesar 9,96% atau sebesar 0,25% jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 9,03%.Kondisi menunjukkan adanya idikasi perbaikan perekonomian. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tahun 2015 Kabupaten Jayapura sebesar Rp. 32.580.000 dan jika dibandingkan PDRB tahun 2013 sebesar Rp.2.952.238,82 mengalami peningkatan pertumbuhan.

Tingkat inflasi Kabupaten Jayapura sampai dengan triwulan keempat tahun 2013 mencapai 16,73% atau mengalami kenaikan sebesar 1,15 bila dibandingkan dengan tingkat inflasi tahun 2012 sebesar 16,54%. Untuk sektor UMKM, prosentase koperasi aktif sebesar 112 koperasi atau 67.88 % di tahun 2015 dari target 70 % tahun 2017.

Pendidikan

Sektor pendidikan merupakan salah satu aspek dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, untuk itu diperlukan upaya peningkatan mutu pendidikan, pemerataan pendidikan, tercapainya efektifitas dan efisiensi pendidikan serta tercukupinya sarana dan prasarana pendidikan. Sarana fisik pendidikan terdiri dari 39 TK, 130 SD/MI, 43 SLPT, 18 SMU, 6 SMK dan 4 Perguruan Tinggi, dengan ratio murid perguruan adalah 1 : 15

Nilai Rata-rata dan kelulusan merupakan indikator keberhasilan institusi pendidikan dalam melaksanakan program – programnya yaitu



meningkatkan sumber daya manusia. Nilai Rata-rata UAS/UAN merupakan refleksi berhasil atau tidaknya murid sekolah (Individu murid) sedangkan Tingkat Kelulusan merupakan indikator keberhasilan institusi pendidikan dalam melaksanakan programnya guna menunjang mutu pendidikan, mutu kelulusan, mutu sekolah yang pada akhirnya akan diperoleh mutu SDM Masyarakat Kabupaten Jayapura.

Angka melek Huruf pada Kab Jayapura pada tahun 2015 adalah 97.21 % dari target 98 % di tahun 2017. jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 96.2 % dan tahun 2012 sebesar 96 % maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk sudah mendapat pendidikan yang cukup baik. Rata- Rata lama sekolah pada tahun 2015 telah mencapai 9.48 tahun (95%) dan harapan lama sekolah telah mencapai 13.79 tahun di tahun 2015 atau 95 %.

Kesehatan

Seperti halnya sektor pendidikan maka pembangunan sektor kesehatan juga merupakan aspek terpenting dalam pembangunan manusia yang berkualitas yang dimulai sejak janin dalam kandungan. Pembangunan kesehatan yang telah dilakukan selama ini di Kabupaten Jayapura telah menunjukkan perubahan peningkatan baik dari segi akses pelayanan kesehatan maupun dari segi kualitas pelayanan. Namun demikian upaya yang dilakukan secara keseluruhan belum dapat mencapai status derajat kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Jayapura sesuai standar nasional, dimana umur harapan hidup baru mencapai 66,32 tahun di 2015 (dengan rumus baru BPS). Pada tahun 2016, Angka kematian bayi 9.28/1000 KLH dengan rincian yaitu jumlah kematian neonatus adalah 17 neonatus dan jumlah kematian bayi adalah 10 bayi. Angka kematian ibu berkisar 137.53/100.000 KLH atau sebanyak 4 ibu pada distrik waoy sebanyak 2 ibu, distrik kanda sebanyak 1 ibu dan distrik ravenirara sebanyak 1 ibu. Angka kematian balita pada tahun 2016 adalah 11/1000 KH yaitu 27 kematian bayi ditambah kematian anak balita sebanyak 5 anak. Angka Parasit Insidens (API) pada tahun 2016 mencapai 190/1000 penduduk atau hanya mencapai target 75 % dari 100/1000 Penduduk., dan menempati posisi Kedua dalam 10 besar penyakit setelah Penyakit ISPA.

Disisi lain pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan tetap terus dilakukan guna meningkatkan akses pelayanan.



Dari 19 Distrik semua sudah tersedia sarana Puskesmas, 6 diantaranya adalah puskesmas dengan fasilitas perawatan, 58 Puskesmas Pembantu (Pustu), 19 Polindes (Pondok bersalin desa) 24 unit puskesmas keliling (pusling)/Ambulans roda 4, 3 unit pusling air serta disetiap puskesmas di sediakan juga pusling roda 2.

Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Laporan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kesehatan
- 1.4 Analisis Aspek Strategis
- 1.5 Sistematika Penyusunan

BAB II Perencanaan Kinerja

- 2.1. Rencana Strategis
 - 2.1.1 Visi dan Misi
 - 2.1.2 Tujuan dan Sasaran
 - 2.1.3 Kebijakan dan Program
- 2.2. Rencana Kerja
 - 2.2.1 Program Kegiatan
 - 2.2.2 Perjanjian Kinerja

BAB. III Akuntabilitas Kinerja

- 3.1. Pengukuran Kinerja
 - 3.1.1 Metode Pengukuran Kinerja
 - 3.1.2 Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran
- 3.2. Evaluasi Kinerja Dan Analisis Kinerja Tahun 2015
 - 3.2.1 Pengukuran Kinerja Kegiatan
 - 3.2.2 Evaluasi Kinerja
 - 3.2.3 Realisasi Anggaran



3.3. Program dan Kegiatan Bersumber APBD II

3.4. Alokasi dan Realisasi Anggaran Bersumber APBD I

3.5. Alokasi dan Realisasi Anggaran Bersumber APBN

BAB. IV Penutup



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

2.1.1 Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kab. Jayapura

Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura telah menyusun rencana strategis sebagai rencana pembangunan jangka menengah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun yaitu periode tahun 2012 - 2017 dengan perhitungan potensi , peluang, dan kendala yang ada atau mungkin akan timbul.

Rencana Strategi setidaknya digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan: (1) dimana kita berada sekarang, (2) ke mana kita akan menuju, dan (3) bagaimana kita menuju kesana. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, para perencana strategis mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Dari uraian singkat di atas, unsur-unsur utama yang perlu secara formal didefinisikan dalam suatu Rencana Strategis adalah pernyataan visi dan misi, penjabaran tujuan dan sasaran strategis serta perumusan strategi pencapaian tujuan/sasaran berupa program kegiatan.

VISI

Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di era sekarang ini adalah dalam upaya mewujudkan Visi Kesehatan Nasional periode tahun 2015 - 2019 yaitu Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan

Dengan memperhatikan dasar-dasar pembangunan kesehatan tersebut serta menyelaraskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013 – 2017, Visi Misi Kabupaten Jayapura, dan juga mempertimbangkan perkembangan, masalah serta berbagai kecenderungan pembangunan kesehatan kedepan,



maka ditetapkan VISI DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA adalah :

“ MASYARAKAT KABUPATEN JAYAPURA SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN MENUJU JAYAPURA BARU”

Masyarakat Kabupaten Jayapura sehat yang mandiri dan berkeadilan menuju Jayapura Baru adalah suatu upaya untuk dapat mewujudkan suatu kondisi dimana masyarakat Kabupaten Jayapura menyadari, mau dan mampu untuk mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi sehingga dapat terbebas dari gangguan kesehatan secara keseluruhan, serta seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Jayapura mendapatkan akses dan layanan kesehatan secara paripurna.

MISI

Sebagai penjabaran dalam upaya mewujudkan Visi diatas maka ditetapkan 5 (lima) misi yang harus diemban oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura yang mencerminkan peran, fungsi dan tugas yang bertanggung jawab secara teknis terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan. Ke 5 (lima) misi tersebut adalah :

1 Melindungi Kesehatan Masyarakat dengan Menjamin Tersedianya Upaya Kesehatan yang Paripurna, Merata, Bermutu dan Berkeadilan.

Salah satu tanggung jawab bidang kesehatan adalah menjamin tersedianya pelayanan kesehatan secara paripurna/menyeluruh yang berkualitas, merata dan terjangkau oleh setiap individu, keluarga dan masyarakat luas. Pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau diharapkan adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan antara pemerintah, masyarakat dan swasta.



2 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, melalui Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang kesehatan termasuk Swasta dan Masyarakat Madani .

Pembangunan kesehatan adalah tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat dan swasta. Dinas kesehatan harus dapat menghimpun berbagai upaya perorangan, kelompok serta masyarakat umum di bidang kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menerapkan prinsip kemitraan yang didasari semangat kebersamaan dan gotong royong agar mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

3 Menjamin Ketersediaan dan Pemerataan Sumber Daya Tenaga Kesehatan yang Profesional .

Pencapaian kinerja pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kualitas pelaksananya yaitu tenaga kesehatan. Elemen ini perlu ditingkatkan dengan menyediakan dan meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan yang profesional melalui pendidikan institusional maupun pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan serta terdistribusi secara merata dan termanfaatkan secara Profesional.

4 Melaksanakan Regulasi dan Intensifikasi Sistem Registrasi dan Akreditasi di Bidang Kesehatan .

Pembangunan kesehatan tidak saja hanya dengan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, tetapi perlu adanya faktor-faktor pendukung yang dapat mengatur terselenggaranya pelayanan kesehatan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat. Untuk itu perlu adanya undang-undang, peraturan-peraturan, ataupun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis oleh pemerintah yang mengatur sistem registrasi dan akreditasi sarana pelayanan kesehatan baik yang dikelola pemerintah, swasta, maupun masyarakat, sehingga dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara tepat dan profesional.



5 Mengupayakan Jaminan Pemeliharaan dan Pembiayaan Kesehatan yang adil , merata, transparan dan akuntable bagi masyarakat .

Guna menjamin ketersediaan sumberdaya pembiayaan kesehatan, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura melakukan advokasi dan sosialisasi kepada semua penyandang dana, baik Pemerintah Daerah, Provinsi, Pusat, Lembaga Donor, masyarakat maupun swasta. Dan didalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura tersebut, harus dilaksanakan secara adil dan merata di wilayah pembangunan Kabupaten Jayapura, transparan, dapat dipertanggung jawabkan serta dapat dipertanggung-gugatkan kepada publik.

2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan Sektoral

Tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima (5) tahun kedepan sesuai dengan visi dan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura adalah sebagai berikut :

Misi.1. Melindungi Kesehatan Masyarakat dengan Menjamin Tersedianya Upaya Kesehatan yang Paripurna, Merata, Bermutu dan Berkeadilan.

Tujuan	1.1	Masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang merata.
Sasaran	1.1.1	Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar sampai ke daerah terpencil dan masyarakat terasing.
	1.1.2	Tersedianya Fasilitas Layanan Kesehatan yang memadai dan merata
	1.1.3	Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan
	1.1.4	Terlaksananya Pengembangan Obat Asli Kab. Jayapura
	1.1.5	Tersedianya pelayanan kesehatan rujukan dan penunjang
Tujuan	1.2	Masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas merata dan terjangkau
Sasaran	1.2.1	Terlaksananya upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular



	1.2.2	Terlaksananya Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi
	1.2.3	Terwujudnya perbaikan gizi masyarakat
	1.2.4	Terlaksananya pengembangan upaya kesehatan lingkungan
	1.2.5	Terlaksananya Layanan Kesehatan Lansia, Remaja, dan penyakit tidak menular
	1.2.6	Terlaksananya Layanan Kesehatan Kerja bagi Sarana Swasta

Misi. 2. : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, melalui Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang kesehatan termasuk Swasta dan Masyarakat Madani .

Tujuan	2.1	Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
Sasaran	2.1.1	Terlaksananya promosi kesehatan sampai ke tingkat Kampung.
	2.1.2	Terwujudnya Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)
	2.1.3	Terwujudnya Deteksi Dini di semua masalah kesehatan dan tertanggulangnya KLB, wabah dan bencana
	2.1.4	Terbentuknya Kampung Siaga yang Aktif

Misi.3. Menjamin Ketersediaan dan Pemerataan Sumber Daya Tenaga Kesehatan yang Profesional .

Tujuan	3.1	Meningkatkan Pemerataan sumber daya dan jenjang karir tenaga kesehatan
Sasaran	3.1.1	Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar
Tujuan	3.2	Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Sumber daya kesehatan menghadapi persaingan global
Sasaran	3.2.1	Terwujudnya kemampuan teknis dan manajemen pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan sesuai bidang profesinya.



Misi.4. Melaksanakan Regulasi dan Intensifikasi Sistem Registrasi dan Akreditasi di Bidang Kesehatan .

Tujuan	4.1	Melindungi masyarakat terhadap praktik pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta
Sasaran	4.1.1	Terakreditasinya sarana pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta.
	4.1.2	Terakreditasinya tenaga Kesehatan
Tujuan	4.2	Melindungi Masyarakat dari Obat, Kosmetika dan Makanan yang Layak Dikonsumsi
Sasaran	4.2.1	Terpantaunya sarana pembuatan/penjualan obat, dan kosmetika
	4.2.2	Terpantaunya Sarana Penjualan Makanan dan Minuman serta industri rumah tangga.

Misi.5. Mengupayakan Jaminan Pemeliharaan dan Pembiayaan Kesehatan yang Adil , Merata, Transparan dan Akuntabel bagi Masyarakat.

Tujuan	5.1	Meningkatkan Pembiayaan Kesehatan Sesuai Standar Pelayanan Minimal.
Sasaran	5.1.1	Tercapainya standar pembiayaan kesehatan sesuai ketentuan undang-undang.
Tujuan	5.2	Meningkatkan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat
Sasaran	5.2.1	Terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat.



2.1.3 Kebijakan Dan Program

Setelah penetapan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran perlu dirumuskan program-program pembangunan kesehatan yang mendasar pada visi dan misi pembangunan kesehatan.

Program pembangunan kesehatan tersebut harus disusun sistematis dan terpadu dengan tetap memprioritaskan skala prioritas RPJMD Kabupaten Jayapura 2012-2017, sehingga dalam penerapannya dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada.

1. Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat

- i. Dalam rangka penyelenggaraan Upaya Kesehatan Dasar bagi masyarakat maka Dinas Kesehatan Kab. Jayapura melaksanakan 5 Program kerja terbagi dalam 14 kegiatan pada tahun 2016
- ii. Kegiatan Prioritas dalam Upaya Kesehatan Dasar adalah :
 - o Kegiatan Pelayanan kepada masyarakat miskin di Kabupaten Jayapura
 - o Kegiatan Perbaikan Gizi masyarakat
 - o Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
 - o Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
 - o Kegiatan pemenuhan Ketersediaan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Jayapura
 - o Kegiatan Penyediaan Operasional untuk setiap Fasilitas layanan Kesehatan di Kabupaten Jayapura
 - o Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Mobile Klinik
 - o Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Dana Jaminan Kesehatan Nasional
 - o Kegiatan Penyediaan BOK Puskesmas untuk layanan Preventif dan Promotif Di masyarakat
 - o Kegiatan Penyediaan BOK Jaminan Persalinan Daerah untuk operasi Rumah Tunggu
 - o Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Layanan Kesehatan
 - o Kegiatan pelatihan penyegaran kegawatdaruratan ibu dan bayi me



Pemerintah Kabupaten Jayapura

pelaksanaan manual rujukan KIA

- Kegiatan Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita
- Kegiatan Pelatihan Pelaksanaan Penjaringan Siswa SD/setingkat
- Kegiatan Pertolongan Persalinan melalui Pelatihan APN bagi bidan kampung

2. Pelayanan Penyediaan Sarana, Prasarana dan Logistik Kesehatan

- i. Dalam rangka penyelenggaraan Penyediaan Sarana, prasarana serta logistic Kesehatan di Fasyankes maka, Dinas Kesehatan Kab.Jayapura melaksanakan 2 program kerja yang mencakup dalam 10 kegiatan pada tahun 2016
- ii. Kegiatan Prioritas dalam Penyediaan Sarana, Prasarana dan Logistik Kesehatan adalah :
 - Pembangunan Puskesmas Pembantu
 - Pembangunan Sarana Puskesmas seperti Rumah Dokter dan Paramedis serta Prasarananya
 - Penyediaan Logistik Obat dan Perbekalan Kesehatan
 - Penyediaan Kendaraan Puskesmas Keliling Roda 4
 - Penyediaan Puskesmas Keliling Air
 - Rehabilitasi Puskesmas Pembantu
 - Pembangunan Pagar Puskesmas
 - Pengadaan Alat Kesehatan
 - Peningkatan Pustu menjadi Puskesmas
 - Monitoring dan Evaluasi

3. Pelayanan Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

- i. Dalam pembangunan kemitraan dalam peningkatan pelayanan kesehatan, Dinas Kabupaten Jayapura pada tahun 2016 melakukan 1 program



Pemerintah Kabupaten Jayapura

kerja yang mencakup 1 kegiatan yaitu membangun kemitraan dengan RUMah sakit Yowari dalam hal ini layanan kesehatan Ibu dan anak serta membangun modul rujukan kesehatan ibu dan anak.

ii. Kegiatan Prioritas yang dilakukan adalah membangun kemitraan peningkatan layanan Kesehatan adalah

- Kemitraan dengan Rumah Sakit Rujukan
- Kemitraan dengan Bidan, DUKun dan Kader di Masyarakat dalam pengembangan Program kesehatan ibu dan anak serta penanggulangan penyakit menular
- Kemitraan dengan Tokoh adat, Agama dan Masyarakat dalam pengembangan Kampung Siaga Aktif
- Kemitraan dengan lembaga donor dalam pengembangan Kinerja Kesehatan

4. Pelayanan Penanggulangan Penyakit Menular

i. Dalam melakukan pengendalian dan penanggulangan penyakit menular di Kabupaten Jayapura, diintervensi melalui 3 program prioritas dan 9 kegiatan antara lain :

- Kegiatan penanggulangan penyakit HIV/IMS
- Kegiatan Penyemprotan/Fogging
- Kegiatan Vaksinasi bagi anak balita dan anak sekolah
- Kegiatan pengendalian TBC, Kusta dan Frambusia
- Kegiatan Peningkatan Imunisasi
- Kegiatan Survei epidemiologi dan penanggulangan wabah/KLB
- Kegiatan penanggulangan ISPA dan diare
- Kegiatan Penanggulangan Filaria

5. Akreditasi Puskesmas

Kementrian Kesehatan RI sedang melaksanakan amanat Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas bahwa Puskesmas harus melayani kesehatan masyarakat yang berkualitas melalui akreditasi Puskesmas. Tahun 2016, Dinas Kesehatan Kab jayapura melakukan proses Akreditasi Puskesmas pada 2 Puskesmas terpilih antara lain Puskesmas Dosay dan Puskesmas



Pemerintah Kabupaten Jayapura

Harapan melalui Kegiatan Registrasi dan Akreditasi Sarana Kesehatan. Pada tahun 2017 telah diumumkan oleh Kementerian Kesehatan RI status akreditasi puskesmas tersebut yaitu Puskesmas harapan dengan akreditasi Madya sedangkan Puskesmas dosay dengan akreditasi dasar.

6. Layanan Pre-Hospital

Bulan Februari 2016, Dinas Kesehatan kab jayapura mengembangkan Layanan Pre-Hospital melalui Unit Pertolongan Cepat Hasale Hokhosobo yang bertujuan melayani masyarakat yang mengalami kecelakaan, rujukan pasien pada daerah pantai dan danau serta unit untuk menolong masyarakat saat terjadi wabah dan bencana. Melalui Kegiatan Upaya Kesehatan dasar, disediakan operasional dan perekrutan tenaganya yang terdiri dari 10 orang petugas kesehatan.

Sedangkan sector lain yang menjadi Urusan Pilihan pada Dinas Kesehatan yang termuat dalam RPJMD tersebut diatas adalah :

1. Pelayanan Aparatur Dinas Kesehatan

- Dalam rangka penyelenggaraan administrasi aparatur Dinas Kesehatan Kab. Jayapura maka dilaksanakan 6 Program Kerja yang terbagi dalam 25 kegiatan pada tahun 2016
- Layanan Aparatur mencakup Operasional Kegiatan Perkantoran, Peningkatan kapasitas Aparatur, peningkatan Kesejahteraan PNS/Purna Tugas serta peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Kesehatan

2. Pelayanan Kefarmasian

- Dalam rangka penyelenggaraan layanan kefarmasian maka Dinas Kesehatan melaksanakan 2 program kerja yang meliputi 3 kegiatan pada tahun 2016
- Kegiatan mencakup tujuan agar terselenggara pemerataan obat dan perbekkes ke seluruh fasyankes di Kabupaten jayapura serta perlindungan masyarakat terhadap obat dan bahan berbahaya yang beredar di kabupaten Jayapura

3. Pelayanan Promosi Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan

- Dalam rangka penyelenggaraan layanan promosi kesehatan dan Kesehatan lingkungan maka Dinas Kesehatan Kab.jayapura melakukan 1 program kerja



Pemerintah Kabupaten Jayapura

yang mencakup 4 kegiatan pada tahun 2016

- Kegiatan tersebut bertujuan peningkatan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat terutama pada pasar tradisional, serta peningkatan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat melalui Kampung siaga aktif.
- 4. Pelayanan Registrasi dan Akreditasi Kesehatan
 - Dinas Kesehatan melaksanakan 1 program kerja yang mencakup 2 kegiatan pada tahun 2016 dengan tujuan monitor registrasi izin pelayanan kesehatan serta akreditasi petugas kesehatan dan kegiatan Penguatan Kapasitas Pengusaha produksi Makanan dan Minuman Papua dalam hal perizinan produknya.
- 5. Pelayanan Manajemen Kesehatan
 - Dinas Kesehatan terus melakukan peningkatan manajemen kesehatan dengan melakukan 2 program kerja yang mencakup 3 kegiatan pada tahun 2016
 - Peningkatan manajemen kesehatan meliputi pelaksanaan Rapat kerja Kesehatan, pembuatan Laporan-laporan Kinerja Kesehatan, Pertemuan Evaluasi dan Penetapan Strategi dalam pelayanan kesehatan antara Dinas Kesehatan dan Fasyankes serta pembaruan data-data kesehatan sebagai data dasar

2.2 Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kab. Jayapura

2.2.1 Program dan Kegiatan

Mengacu pada program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura tahun 2013 – 2017, pada pelaksanaannya setiap tahun dijabarkan dalam Rencana kerja tahunan (Renja SKPD) sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan alokasi dana SKPD pertahun. Dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan SKPD diawali dengan pertemuan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten dimana masukan perencanaan dari tingkat Distrik dan Kampung dapat diakomodir dan diselaraskan dengan perencanaan dari masing-masing



SKPD serta Pagu Alokasi anggaran dari BAPPEDA Kabupaten dan selanjutnya dihasilkan rumusan Dokumen Renja SKPD tahunan.

Dokumen rencana kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Tahun 2016 memuat informasi tentang : sasaran yang dicapai selama Tahun 2016, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi / sektor lain.

Adapun komponen rencana kinerja meliputi :

Sasaran

Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen renstra. Yaitu sasaran yang akan diwujudkan pada tahun 2016 beserta indikator dan rencana tingkat capaian (targetnya). Dalam Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kab. Jayapura mengacu pada 1 sasaran strategis Kesehatan RPJMD 2013-2017 dan 22 Sasaran strategis Renstra Dinas Kesehatan Kab. Jayapura 2013-2017.

Program

Program-program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategi dan yang akan mewujudkan sasaran yang ditetapkan. Pada tahun anggaran 2016 merencanakan kinerja dalam 22 Program Kesehatan yaitu :

NO	PROGRAM
1	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
	PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
5	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAKTERAAN PNS/ PURNA TUGAS
6	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN



7	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
8	PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
9	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
10	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
11	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
12	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT
	MENULAR
13	PRORGAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN
14	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN
15	PROGRAM PENGADAAN PENINGKATAN DAN PERBAIKAN
	SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS / PUSKESMAS
	PEMBANTU DAN JARINGANNYA
16	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
17	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA
18	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA
19	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN
20	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK
21	PROGRAM REGISTRASI DAN AKREDISAI BIDANG KESEHATAN
22	PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN KESEHATAN

Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yaitu tahun 2016 yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya. Pada anggaran 2016 menetapkan 112 Kegiatan yang memuat sub-sub kegiatan, antara lain :

NO	PROGRAM	JML KEGIATAN
1	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	15
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	8
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER APARATUR	2
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	1
5	PROGRAM FASILITASI PINDAH PNS/PURNA TUGAS	1
6	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	2
7	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	48
8	PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	1
9	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	4



10	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	2
11	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	2
12	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	6
13	PRORGAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	1
14	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN	2
15	PROGRAM PENGADAAN PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	8
16	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	2
17	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA	1
18	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA	1
19	PROGRAM PENGAWASANDAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN	1
20	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	1
21	PROG AM REGISTRASI DAN AKREDITASI BIDANG KESEHATAN	1
22	PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN KESEHATAN	2
	TOTAL	112

2.2.2 Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan ke dalam kelompok :

Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya

Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan

Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcome* merupakan ukuran



seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan untuk tahun 2015 berdasarkan Indikator Kinerja Pada RPJMD 2013-2017 dan Renstra Dinas Kesehatan Kab. Jayapura 2012-2017 yang memuat 5 indikator utama yaitu :

- 1 Ketersediaan Anggaran Kesehatan sebanyak 1 indikator
- 2 Kualitas Kesehatan sebanyak 27 indikator
- 3 Kuantitas dan Kualitas Tenaga Medis sebanyak 2 indikator
- 4 Kuantitas Sarana dan Prasarana sebanyak 5 indikator
- 5 Kualitas Pelayanan sebanyak 7 indikator

Rencana kinerja sebagaimana diuraikan di atas dituangkan dalam matriks Rencana Kinerja Tahunan (RKT) memuat seluruh kegiatan, *selengkapnya pada Lampiran 1.*

Perjanjian Kinerja tahun 2016

Pada tahun 2016, Dinas Kesehatan Kab jayapura dengan total anggaran adalah Rp. 83.557.737.392 menetapkan Program dan kegiatan dengan fokus pada indikator-indikator SPM Kesehatan dan indikator RPJMD 2013-2017 yang telah ditetapkan. Penetapan Kinerja 2016 dapat digambarkan pada lampiran dokumen ini.



2.1.3 Kebijakan Dan Program

Setelah penetapan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran perlu dirumuskan program-program pembangunan kesehatan yang mendasar pada visi dan misi pembangunan kesehatan.

Program pembangunan kesehatan tersebut harus disusun sistematis dan terpadu dengan tetap memprioritaskan skala prioritas RPJMD Kabupaten Jayapura 2012-2017, sehingga dalam penerapannya dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada.

1. Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat

- i. Dalam rangka penyelenggaraan Upaya Kesehatan Dasar bagi masyarakat maka Dinas Kesehatan Kab. Jayapura melaksanakan 5 Program kerja terbagi dalam 14 kegiatan pada tahun 2016
- ii. Kegiatan Prioritas dalam Upaya Kesehatan Dasar adalah :
 - o Kegiatan Pelayanan kepada masyarakat miskin di Kabupaten Jayapura
 - o Kegiatan Perbaikan Gizi masyarakat
 - o Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
 - o Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
 - o Kegiatan pemenuhan Ketersediaan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Jayapura
 - o Kegiatan Penyediaan Operasional untuk setiap Fasilitas layanan Kesehatan di Kabupaten Jayapura
 - o Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Mobile Klinik
 - o Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Dana Jaminan Kesehatan Nasional
 - o Kegiatan Penyediaan BOK Puskesmas untuk layanan Preventif dan Promotif Di masyarakat
 - o Kegiatan Penyediaan BOK Jaminan Persalinan Daerah untuk operasi Rumah Tunggu
 - o Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Layanan Kesehatan
 - o Kegiatan pelatihan penyegaran kegawatdaruratan ibu dan bayi me



Pemerintah Kabupaten Jayapura

pelaksanaan manual rujukan KIA

- Kegiatan Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita
- Kegiatan Pelatihan Pelaksanaan Penjaringan Siswa SD/setingkat
- Kegiatan Pertolongan Persalinan melalui Pelatihan APN bagi bidan kampung

2. Pelayanan Penyediaan Sarana, Prasarana dan Logistik Kesehatan

- i. Dalam rangka penyelenggaraan Penyediaan Sarana, prasarana serta logistic Kesehatan di Fasyankes maka, Dinas Kesehatan Kab.Jayapura melaksanakan 2 program kerja yang mencakup dalam 10 kegiatan pada tahun 2016
- ii. Kegiatan Prioritas dalam Penyediaan Sarana, Prasarana dan Logistik Kesehatan adalah :
 - Pembangunan Puskesmas Pembantu
 - Pembangunan Sarana Puskesmas seperti Rumah Dokter dan Paramedis serta Prasarananya
 - Penyediaan Logistik Obat dan Perbekalan Kesehatan
 - Penyediaan Kendaraan Puskesmas Keliling Roda 4
 - Penyediaan Puskesmas Keliling Air
 - Rehabilitasi Puskesmas Pembantu
 - Pembangunan Pagar Puskesmas
 - Pengadaan Alat Kesehatan
 - Peningkatan Pustu menjadi Puskesmas
 - Monitoring dan Evaluasi

3. Pelayanan Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

- i. Dalam pembangunan kemitraan dalam peningkatan pelayanan kesehatan, Dinas Kabupaten Jayapura pada tahun 2016 melakukan 1 program



Pemerintah Kabupaten Jayapura

kerja yang mencakup 1 kegiatan yaitu membangun kemitraan dengan RUMah sakit Yowari dalam hal ini layanan kesehatan Ibu dan anak serta membangun modul rujukan kesehatan ibu dan anak.

ii. Kegiatan Prioritas yang dilakukan adalah membangun kemitraan peningkatan layanan Kesehatan adalah

- Kemitraan dengan Rumah Sakit Rujukan
- Kemitraan dengan Bidan, DUKun dan Kader di Masyarakat dalam pengembangan Program kesehatan ibu dan anak serta penanggulangan penyakit menular
- Kemitraan dengan Tokoh adat, Agama dan Masyarakat dalam pengembangan Kampung Siaga Aktif
- Kemitraan dengan lembaga donor dalam pengembangan Kinerja Kesehatan

4. Pelayanan Penanggulangan Penyakit Menular

i. Dalam melakukan pengendalian dan penanggulangan penyakit menular di Kabupaten Jayapura, diintervensi melalui 3 program prioritas dan 9 kegiatan antara lain :

- Kegiatan penanggulangan penyakit HIV/IMS
- Kegiatan Penyemprotan/Fogging
- Kegiatan Vaksinasi bagi anak balita dan anak sekolah
- Kegiatan pengendalian TBC, Kusta dan Frambusia
- Kegiatan Peningkatan Imunisasi
- Kegiatan Survei epidemiologi dan penanggulangan wabah/KLB
- Kegiatan penanggulangan ISPA dan diare
- Kegiatan Penanggulangan Filaria

5. Akreditasi Puskesmas

Kementrian Kesehatan RI sedang melaksanakan amanat Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas bahwa Puskesmas harus melayani kesehatan masyarakat yang berkualitas melalui akreditasi Puskesmas. Tahun 2016, Dinas Kesehatan Kab jayapura melakukan proses Akreditasi Puskesmas pada 2 Puskesmas terpilih antara lain Puskesmas Dosay dan Puskesmas



Harapan melalui Kegiatan Registrasi dan Akreditasi Sarana Kesehatan. Pada tahun 2017 telah diumumkan oleh Kementerian Kesehatan RI status akreditasi puskesmas tersebut yaitu Puskesmas harapan dengan akreditasi Madya sedangkan Puskesmas dosay dengan akreditasi dasar.

6. Layanan Pre-Hospital

Bulan Februari 2016, Dinas Kesehatan kab jayapura mengembangkan Layanan Pre-Hospital melalui Unit Pertolongan Cepat Hasale Hokhosobo yang bertujuan melayani masyarakat yang mengalami kecelakaan, rujukan pasien pada daerah pantai dan danau serta unit untuk menolong masyarakat saat terjadi wabah dan bencana. Melalui Kegiatan Upaya Kesehatan dasar, disediakan operasional dan perekrutan tenaganya yang terdiri dari 10 orang petugas kesehatan.

Sedangkan sector lain yang menjadi Urusan Pilihan pada Dinas Kesehatan yang termuat dalam RPJMD tersebut diatas adalah :

1. Pelayanan Aparatur Dinas Kesehatan

- Dalam rangka penyelenggaraan administrasi aparatur Dinas Kesehatan Kab. Jayapura maka dilaksanakan 6 Program Kerja yang terbagi dalam 25 kegiatan pada tahun 2016
- Layanan Aparatur mencakup Operasional Kegiatan Perkantoran, Peningkatan kapasitas Aparatur, peningkatan Kesejahteraan PNS/Purna Tugas serta peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Kesehatan

2. Pelayanan Kefarmasian

- Dalam rangka penyelenggaraan layanan kefarmasian maka Dinas Kesehatan melaksanakan 2 program kerja yang meliputi 3 kegiatan pada tahun 2016
- Kegiatan mencakup tujuan agar terselenggara pemerataan obat dan perbekkes ke seluruh fasyankes di Kabupaten jayapura serta perlindungan masyarakat terhadap obat dan bahan berbahaya yang beredar di kabupaten Jayapura

3. Pelayanan Promosi Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan

- Dalam rangka penyelenggaraan layanan promosi kesehatan dan Kesehatan lingkungan maka Dinas Kesehatan Kab.jayapura melakukan 1 program kerja



Pemerintah Kabupaten Jayapura

yang mencakup 4 kegiatan pada tahun 2016

- Kegiatan tersebut bertujuan peningkatan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat terutama pada pasar tradisional, serta peningkatan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat melalui Kampung siaga aktif.
4. Pelayanan Registrasi dan Akreditasi Kesehatan
- Dinas Kesehatan melaksanakan 1 program kerja yang mencakup 2 kegiatan pada tahun 2016 dengan tujuan monitor registrasi izin pelayanan kesehatan serta akreditasi petugas kesehatan dan kegiatan Penguatan Kapasitas Pengusaha produksi Makanan dan Minuman Papua dalam hal perizinan produknya.
5. Pelayanan Manajemen Kesehatan
- Dinas Kesehatan terus melakukan peningkatan manajemen kesehatan dengan melakukan 2 program kerja yang mencakup 3 kegiatan pada tahun 2016
 - Peningkatan manajemen kesehatan meliputi pelaksanaan Rapat kerja Kesehatan, pembuatan Laporan-laporan Kinerja Kesehatan, Pertemuan Evaluasi dan Penetapan Strategi dalam pelayanan kesehatan antara Dinas Kesehatan dan Fasyankes serta pembaruan data-data kesehatan sebagai data dasar

2.2 Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kab. Jayapura

2.2.1 Program dan Kegiatan

Mengacu pada program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura tahun 2013 – 2017, pada pelaksanaannya setiap tahun dijabarkan dalam Rencana kerja tahunan (Renja SKPD) sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan alokasi dana SKPD pertahun. Dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan SKPD diawali dengan pertemuan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten dimana masukan perencanaan dari tingkat Distrik dan Kampung dapat diakomodir dan diselaraskan dengan perencanaan dari masing-masing



SKPD serta Pagu Alokasi anggaran dari BAPPEDA Kabupaten dan selanjutnya dihasilkan rumusan Dokumen Renja SKPD tahunan.

Dokumen rencana kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Tahun 2016 memuat informasi tentang : sasaran yang dicapai selama Tahun 2016, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi / sektor lain.

Adapun komponen rencana kinerja meliputi :

Sasaran

Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen renstra. Yaitu sasaran yang akan diwujudkan pada tahun 2016 beserta indikator dan rencana tingkat capaian (targetnya). Dalam Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kab. Jayapura mengacu pada 1 sasaran strategis Kesehatan RPJMD 2013-2017 dan 22 Sasaran strategis Renstra Dinas Kesehatan Kab. Jayapura 2013-2017.

Program

Program-program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategi dan yang akan mewujudkan sasaran yang ditetapkan. Pada tahun anggaran 2016 merencanakan kinerja dalam 22 Program Kesehatan yaitu :

NO	PROGRAM
1	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
	PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
5	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAKTERAAN PNS/ PURNA TUGAS
6	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN



7	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
8	PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
9	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
10	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
11	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
12	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT
	MENULAR
13	PRORGAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN
14	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN
15	PROGRAM PENGADAAN PENINGKATAN DAN PERBAIKAN
	SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS / PUSKESMAS
	PEMBANTU DAN JARINGANNYA
16	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
17	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA
18	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA
19	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN
20	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK
21	PROGRAM REGISTRASI DAN AKREDISAI BIDANG KESEHATAN
22	PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN KESEHATAN

Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yaitu tahun 2016 yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya. Pada anggaran 2016 menetapkan 112 Kegiatan yang memuat sub-sub kegiatan, antara lain :

NO	PROGRAM	JML KEGIATAN
1	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	15
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	8
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER APARATUR	2
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	1
5	PROGRAM FASILITASI PINDAH PNS/PURNA TUGAS	1
6	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	2
7	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	48
8	PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	1
9	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	4



10	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	2
11	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	2
12	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	6
13	PRORGAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	1
14	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN	2
15	PROGRAM PENGADAAN PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	8
16	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	2
17	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA	1
18	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA	1
19	PROGRAM PENGAWASANDAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN	1
20	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	1
21	PROG AM REGISTRASI DAN AKREDITASI BIDANG KESEHATAN	1
22	PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN KESEHATAN	2
	TOTAL	112

2.2.2 Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan ke dalam kelompok :

Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya

Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan

Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcome* merupakan ukuran



seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan untuk tahun 2015 berdasarkan Indikator Kinerja Pada RPJMD 2013-2017 dan Renstra Dinas Kesehatan Kab. Jayapura 2012-2017 yang memuat 5 indikator utama yaitu :

- 1 Ketersediaan Anggaran Kesehatan sebanyak 1 indikator
- 2 Kualitas Kesehatan sebanyak 27 indikator
- 3 Kuantitas dan Kualitas Tenaga Medis sebanyak 2 indikator
- 4 Kuantitas Sarana dan Prasarana sebanyak 5 indikator
- 5 Kualitas Pelayanan sebanyak 7 indikator

Rencana kinerja sebagaimana diuraikan di atas dituangkan dalam matriks Rencana Kinerja Tahunan (RKT) memuat seluruh kegiatan, *selengkapnya pada Lampiran 1.*

Perjanjian Kinerja tahun 2016

Pada tahun 2016, Dinas Kesehatan Kab jayapura dengan total anggaran adalah Rp. 83.557.737.392 menetapkan Program dan kegiatan dengan fokus pada indikator-indikator SPM Kesehatan dan indikator RPJMD 2013-2017 yang telah ditetapkan. Penetapan Kinerja 2016 dapat digambarkan pada lampiran dokumen ini.



Tabel 2.2

Strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan Kab. Jayapura

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang merata	<ul style="list-style-type: none"> · Terselenggaranya akses pelayanan kesehatan dasar sampai ke daerah terpencil dan masyarakat terasing 	<ul style="list-style-type: none"> · Meningkatkan Ketersediaan Sarana ,Prasarana dan logistik Kesehatan yang merata 	<ul style="list-style-type: none"> · Pengaktifan dan Peningkatan volume kegiatan Flying Health Program ke Daerah terisolasi/sangat terpencil
	<ul style="list-style-type: none"> · Tersedianya Fasilitas Layanan Kesehatan yang memadai dan merata 	<ul style="list-style-type: none"> · Kerjasama Lintas sektor untuk Akses Ke Daerah sangat terpencil/terisolasi 	<ul style="list-style-type: none"> · Pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana dan Logistik pada Puskesmas yang melayani Rawat Inap sebagai sentra rujukan dari fasyankes terdekat
	<ul style="list-style-type: none"> · Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> · Penguatan Sentra-sentra rujukan yang dapat melayani Fasyankes terdekat 	<ul style="list-style-type: none"> · Prioritas Pembangunan Pos Kesehatan kampung
	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya Pengembangan Obat Asli Kab. Jayapura 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Obat asli masyarakat kabupaten Jayapura 	<ul style="list-style-type: none"> • Apotek Hidup/Tanaman Obat pada lingkungan masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> · Tersedianya pelayanan kesehatan rujukan dan penunjang 		<ul style="list-style-type: none"> i. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan yang memenuhi syarat
Masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas merata dan terjangkau	<ul style="list-style-type: none"> · Terlaksananya upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular 	<ul style="list-style-type: none"> · Mengoptimalkan dana BOK, Dana Operasional Fasyankes dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> · Mengoptimalkan sistem perencanaan Fasyankes melalui POA dana yang tepat program



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	<ul style="list-style-type: none">· Terlaksananya Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi	<ul style="list-style-type: none">· Mengembangkan metode untuk meningkatkan kualitas status kesehatan ibu dan bayi serta mencegah terjadinya peningkatan AKI dan AKB	<ul style="list-style-type: none">· Mengefektifkan Perda N0.11 tahun 2011
	<ul style="list-style-type: none">· Terwujudnya perbaikan gizi masyarakat	<ul style="list-style-type: none">· Meningkatkan Layanan gizi masyarakat	<ul style="list-style-type: none">· Mengoptimalkan P4K serta Monitoring evaluasi yang efektif
	<ul style="list-style-type: none">· Terlaksananya pengembangan upaya kesehatan lingkungan	<ul style="list-style-type: none">· Kerjasama Lintas sektor dengan Aparat Kampung	<ul style="list-style-type: none">· Penanganan gizi buruk
			<ul style="list-style-type: none">· Membangun komunikasi dan kerjasama yang intensif dengan BPMPK dan seluruh Aparat Kampung dalam pengalokasian dana kampung untuk bidang kesehatan
			<ul style="list-style-type: none">· Meningkatkan penanggulangan masalah gizi melalui suplemen makanan (BMT) dan peningkatan keluarga sadar gizi
			<ul style="list-style-type: none">· Meningkatkan Rumah tangga bersanitasi baik



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	<ul style="list-style-type: none"> · Terlaksananya promosi kesehatan sampai ke tingkat Kampung. 	<ul style="list-style-type: none"> · Mengoptimalkan dana BOK 	<ul style="list-style-type: none"> · Mengoptimalkan sistem perencanaan Fasyankes melalui POA dana yang tepat program
	<ul style="list-style-type: none"> · Terwujudnya Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) 	<ul style="list-style-type: none"> · Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan di wilayahnya 	<ul style="list-style-type: none"> · Pembentukan Forum Kesehatan Kampung sebagai jaringan komunikasi dan informasi yang tepat dan akurat
	<ul style="list-style-type: none"> · Terwujudnya Deteksi Dini di semua masalah kesehatan dan tertanggulangnya KLB, wabah dan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> · Mengoptimalkan Dana DAK dan kerjasama dengan badan kemitraan 	<ul style="list-style-type: none"> · Pembentukan Desa siaga yang aktif melalui kerjasama lintas sector
	<ul style="list-style-type: none"> · Terbentuknya Kampung Siaga yang Aktif 	<ul style="list-style-type: none"> · Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui kerjasama dengan tokoh agama, masyarakat, lintas sektor dan NGO 	<ul style="list-style-type: none"> · Mengembangkan Surveilans penyakit dan masalah kesehatan berbasis masyarakat
Meningkatkan Pemerataan sumber daya dan jenjang karir tenaga kesehatan	Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar	Pemenuhan ketersediaan Petugas Kesehatan yang memadai	Mengoptimalkan penerimaan pegawai profesional baik melalui jalur CPNS maupun tenaga kontrak yang dibiayai oleh Pemerintah
Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Sumber daya kesehatan menghadapi persaingan global	Terwujudnya kemampuan teknis dan manajemen pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan sesuai bidang profesinya.	Mengembangkan kemampuan sumber daya manusia baik jalur formal maupun informal	Pelatihan teknis fungsional, pelatihan kemampuan manajerial, maupun tugas belajar



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Pembimbingan Sumber daya manusia lewat bimbingan teknis dan fasilitasi kegiatan
Melindungi masyarakat terhadap praktik pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta	Terakreditasinya sarana pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta.	Penguatan sistem Akreditasi dan Perizinan Layanan kesehatan pemerintah dan swasta	Peraturan Daerah mengenai izin fasilitas Layanan Kesehatan agar seluruh fasilitas kesehatan terstandarisasi dalam melakukan pelayanan kesehatan
Melindungi Masyarakat dari Obat, Kosmetika dan Makanan yang Layak Dikonsumsi	Terpantaunya sarana pembuatan/penjualan obat, dan kosmetika	Mengoptimalkan peraturan mengenai standard fasilitas kefarmasian	Pemantauan alur distribusi bahan kefarmasian, Alkes dan makanan
	Terpantaunya Sarana Penjualan Makanan dan Minuman serta industri rumah tangga.	Kerjasama lintas sektor antara pemerintah (Pemerintah daerah dan BBPOM) dan fasilitas kesehatan serta PIRT milik swasta	Pemberlakuan sanksi menurut peraturan perundang-undangan bagi setiap fasilitas kesehatan dan sarana kefarmasian
Meningkatkan Pembiayaan Kesehatan Sesuai Standar Pelayanan Minimal.	Tercapainya standar pembiayaan kesehatan sesuai ketentuan undang-undang.	Mengoptimalkan pembiayaan melalui Jamkesmas, Jamkespa, Jampersal yang bersumber dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten	mengoptimalkan Perda mengenai Jamkesmas dan Jampersal
Meningkatkan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat	Terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat.	Membangun Komunikasi yang intensif antara pemerintah dan Masyarakat dan penggunaan Jaminan pemeliharaan masyarakat tersebut	Kerjasama lintas sektor tentang pemberlakuan Jaminan pemeliharaan kesehatan serta data yang akurat mengenai peserta pembiayaan tersebut
			Meningkatkan daya saing fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah agar dapat melayani masyarakat sesuai dengan kewajiban fasilitas tersebut